

Motif Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lajuk

Dwi Novianti^{1*} dan Agus Machfud Fauzi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa
dwinovianti.18029@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This research aims to determine 1) the socio-economic conditions of the Lajuk village community regarding the BPNT program; 2) to analyze the benefits motives of BPNT; 3) and to analyze to motivate BPNT. This is motivated by data that BPNT often does not hit the target. The method used in this case is qualitative with data collection techniques of observation, documentation and interviews. The results of this research found that the objective socio-economic conditions in Lajuk village were that the majority of BPNT recipients were from the upper class so it could be said that they were not on target. The community's motive for receiving BPNT assistance refers to this motive because the community has a culture that is closely related to religion, where this assistance is considered part of the sustenance given by God so it should not be rejected. Apart from that, it is also due to the increasingly degraded culture of shame, which is actually a culture of shame and often normalizes conditions or small corruption so that the act of providing BPNT that is not on target is actually part of small corruption but the community is not aware of it. The community's motive for receiving BPNT assistance as a form of to motivate this because it is to meet economic needs. For people who really deserve assistance, the existence of this assistance is able to meet their needs and reduce the burden on those responsible in the economic sector. Meanwhile, for people who actually do not deserve assistance, they still feel entitled to receive it because they have paid taxes and should not be denied their sustenance.

Keywords: Motive; Non-Cash Food Assistance (BPNT); Economy; Beneficiaries; Social Action.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) kondisi objektif sosial ekonomi masyarakat desa Lajuk tentang program BPNT; 2) untuk menganalisis because of motive manfaat BPNT; 3) dan untuk menganalisis in order to motivate BPNT. Hal ini dilatarbelakangi atas data bahwasannya sering kali BPNT tidak tepat sasaran. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari studi ini ditemukan bahwasannya kondisi objektif sosial ekonomi di desa Lajuk adalah sebagian besar penerima BPNT adalah kalangan atas sehingga bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Motif masyarakat menerima bantuan BPNT mengacu pada because of motive dikarenakan masyarakat memiliki budaya yang berkaitan erat dengan agama dimana bantuan ini dianggap sebagai bagian dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan sehingga tidak sepatutnya ditolak. Selain itu juga dikarenakan semakin terdegradasinya budaya malu, yang mana sebenarnya budaya malu dan sering kali menormalisasi kecurangan atau korupsi kecil sehingga dengan demikian tindakan pemberian BPNT yang tidak tepat sasaran ini sebenarnya bagian dari korupsi kecil tetapi masyarakat tidak menyadarinya. Motif masyarakat menerima bantuan BPNT sebagai

bentuk in order to motivate ini dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Bagi masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan, keberadaan bantuan ini mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan mengurangi beban penanggungnya dalam bidang ekonomi. Sementara itu, bagi masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan, mereka masih merasa berhak menerima karena sudah membayar pajak dan semestinya rezeki tidak ditolak.

Kata Kunci: Motif; Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Ekonomi; Penerima Manfaat; Tindakan Sosial.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2022b). Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, khususnya negara berkembang (Suharto, 2014).

Pengentasan kemiskinan di negara berkembang menjadi upaya penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali negara Indonesia. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Menimbang isi dalam UUD tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin. Bentuk tanggung jawab dalam penanganan fakir miskin tertuang pada pasal 13 yakni, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak (Presiden Republik Indonesia, 2011).

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan transformasi dari program Raskin dan Rastra. Program BPNT dimulai pada 2017 dan diperluas ke seluruh wilayah sejak 2019. BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan harapan mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bantuan ini diberikan setiap bulan dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pokok di e-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur.

Realisasi program BPNT juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo termasuk di Desa Lajuk. Program BPNT di Desa Lajuk mulai terlaksana pada tahun 2018. Jumlah KPM BPNT di Desa Lajuk sebesar 32%. Dimana jumlah penduduk Desa Lajuk menurut Kepala Keluarga (KK) sebesar 2063 (BPS Indonesia, 2021). Sedangkan jumlah KPM Program BPNT di Desa Lajuk pada Desember 2022 sebesar 513 KPM (Sidoarjo, 2021). Setiap KPM tersebut memiliki kartu sembako

yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Melalui kartu tersebut, KPM dapat menerima manfaat sebesar Rp200.000/bulan yang hanya dapat dibelanjakan berupa sembako di e-warong yang telah bekerjasama dengan Bank BNI.

Namun, pada April 2022 penyaluran BPNT di Desa Lajuk cair berupa uang tunai sebesar Rp200.000 untuk bulan Mei. Diperkuat Republikjatim.com (Republikjatim.com, 2022) bahwa setiap KPM menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp100.000/bulan yang disalurkan untuk bulan April, Mei dan Juni dengan total Rp300.000 dan BPNT sebesar Rp200.000 untuk bulan Mei yang disalurkan berupa uang tunai. Hal ini terjadi karena hasil evaluasi penyaluran di sejumlah tempat, bahwa KPM menerima sembako yang telah dipaketkan dan kualitas barang di bawah standart serta untuk percepatan penyaluran bantuan (Febrinastri & Firmansyah, 2022). Realita tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Permensos No.20 Tahun 2019 Pasal 23 Ayat (2) bahwa BPNT tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan (Menteri Sosial Republik Indonesia, 2019).

Selain itu, pelaksanaan program BPNT di Desa Lajuk juga kurang tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya KPM dari strata menengah dan atas juga menerima BPNT. KPM tersebut merasa berhak menerima program BPNT, sehingga mereka juga meminta, meskipun sebetulnya telah mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari termasuk kebutuhan pangan. Realita ini diperkuat oleh temuan Harianto (Harianto, 2015) bahwa cara hidup—memiskinkan diri dikembangkan oleh rumah tangga strata sosial menengah dan atas dalam struktur sosial desa. Cara hidup memiskinkan diri ini bukan sebagai bentuk adaptasi rasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi sebagai bentuk kecemburuan sosial saat merespon penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung. Tanggapan tersebut juga dikaitkan hak dan kewajiban sebagai warga desa, dimana mereka yang memiskinkan diri menganggap telah memenuhi kewajiban sebagai warga desa seperti mengikuti kerja sukarela dan membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, berbagai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Lajuk membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Motif Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah banyak dilakukan dengan beragam fokus dan pendekatan. Trino Ikhsan dkk. (2019) meneliti hubungan pelaksanaan BPNT dengan kesejahteraan masyarakat

miskin di Gampong Kutatinggi, Aceh Barat Daya. Penelitian ini menunjukkan bahwa program BPNT mampu meningkatkan kesejahteraan karena lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung stabilitas ekonomi masyarakat melalui sistem keuangan inklusif. Aspar dkk. (2020) menemukan bahwa pelaksanaan BPNT di Kelurahan Bontoduri, Kota Makassar sudah cukup membantu penerima manfaat, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran, akses terhadap e-warung yang sulit, serta ketidakteraturan jadwal penyaluran.

Sementara itu, Rosaliana dan Hardjati (2019) dalam penelitiannya di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, mengungkap bahwa meskipun penyaluran BPNT berjalan tepat waktu, program ini masih kurang tepat sasaran dan belum optimal dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Anwar dkk. (2020) menilai pelaksanaan BPNT di Kelurahan Sisir, Kota Batu, berjalan efektif karena didukung oleh pelaksanaan tugas yang baik oleh sumber daya manusia serta lingkungan sosial yang mendukung. Penelitian Harianto (2015b) turut memberikan kontribusi penting dalam memahami strategi bertahan hidup rumah tangga miskin, di mana ketergantungan pada bantuan pemerintah menjadi salah satu strategi utama. Dalam penelitiannya yang lain (2015a), Harianto juga menyoroti bahwa program penanggulangan kemiskinan di pedesaan cenderung bersifat top-down, kurang sosialisasi, dan berjangka pendek. Bahkan, beberapa program dinilai berpotensi menciptakan kemiskinan baru karena pelaksanaannya yang tidak tepat sasaran.

Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa fokus utama lebih banyak berkisar pada evaluasi teknis dan administratif program BPNT, sementara motif subjektif dari penerima manfaat masih belum banyak dieksplorasi. Hal inilah yang menjadi keunikan dan kebaruan dalam penelitian ini, yaitu menggali lebih dalam motif penerima manfaat dalam menerima dan memanfaatkan bantuan BPNT sebagai bentuk strategi penanggulangan kemiskinan.

2.2 Motif Sosial Menurut Alfred Schutz

Untuk memahami motif sosial dari penerima bantuan, teori Alfred Schutz menjadi landasan konseptual yang tepat. Schutz membedakan dua jenis motif sosial yaitu *because of motive* dan *in order to motive*. *Because of motive* merujuk pada tindakan yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, seperti keterbatasan ekonomi yang berkepanjangan atau ketidakstabilan pekerjaan yang pernah dialami oleh individu. Sedangkan *in order to motive* menjelaskan tujuan sadar yang ingin dicapai oleh individu, misalnya keinginan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari atau mengurangi beban ekonomi keluarga.

Dalam konteks BPNT, teori Schutz memungkinkan peneliti untuk memahami tindakan sosial penerima manfaat secara lebih mendalam dari sudut pandang pelaku

itu sendiri. Penerima manfaat tidak dilihat sekadar sebagai objek program, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki pertimbangan dan tujuan tertentu dalam mengambil keputusan menerima bantuan. Dengan memahami motif-motif ini, program bantuan sosial seperti BPNT dapat dievaluasi secara lebih holistik, tidak hanya dari sisi implementasi teknis, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan pengalaman subjektif penerimanya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan tujuan memahami dan mengeksplorasi fenomena sosial terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan konsep Creswell (2008), pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan analisis kasus secara mendalam, dengan instrumen penelitian yang difokuskan pada interaksi manusia, sesuai dengan konsep Sadewo (2016). Data diperoleh langsung dari partisipan untuk menjelaskan motif penerima manfaat BPNT dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, penelitian memanfaatkan perspektif fenomenologi Alfred Schutz, sesuai dengan pandangan Creswell (2013), untuk menganalisis motif penerima manfaat BPNT. Teori fenomenologi Schutz memperkenalkan dua motif utama: motif tujuan (*in order to motive*) dan motif sebab (*because of motive*) (Haryanto, 2012).

Lokasi penelitian terpilih berada di Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Alasan pemilihan lokasi berakar dari fakta bahwa program BPNT di wilayah ini dihadapkan pada berbagai masalah, seperti penerima BPNT dari berbagai lapisan sosial, penyaluran bantuan berupa uang tunai yang tidak sesuai dengan regulasi, dan adanya keluarga penerima manfaat yang enggan diidentifikasi sebagai keluarga miskin namun tetap menerima bantuan. Temuan ini menjadi dasar yang signifikan bagi penelitian ini. Pengambilan subyek penelitian dilakukan secara purposive, dengan fokus pada keberagaman penerima BPNT dari strata sosial atas, menengah, dan bawah. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan, terutama ke keluarga penerima manfaat. Analisis data menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengacu pada kerangka konsep Creswell (2015).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kondisi Obyektif Sosial Ekonomi Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program BPNT ditujukan kepada keluarga tidak mampu, termasuk 25% terbawah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, penelitian di Desa Lajuk menunjukkan bahwa penerima BPNT berasal dari berbagai strata sosial: atas, menengah, dan bawah. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan, pekerjaan, kepemilikan harta, tingkat pendidikan, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan dan pendapatan para subjek bervariasi, mulai dari ibu rumah tangga tanpa penghasilan, hingga pengusaha buis beton dengan penghasilan Rp 7.000.000 per bulan. Perbedaan pekerjaan ini berdampak langsung pada stratifikasi sosial. Beberapa subjek memperoleh penghasilan tetap, sementara yang lain mengandalkan pekerjaan tidak menentu atau tambahan.

Dari aspek tempat tinggal, mayoritas subjek tinggal di rumah milik pribadi dengan bangunan permanen. Luas rumah pun cenderung besar, memperkuat asumsi bahwa tidak semua penerima BPNT tergolong miskin. Dalam hal kepemilikan harta, terdapat subjek yang memiliki kendaraan lebih dari satu, bahkan ada yang memiliki mobil. Begitu pula dengan kepemilikan tanah, sebagian subjek memiliki aset berupa rumah dan tanah. Tingkat pendidikan pun menunjukkan keragaman. Sebagian besar subjek lulusan SLTA, namun ada pula yang tidak tamat SD. Tingkat pendidikan ini mencerminkan latar belakang ekonomi keluarga masa lalu dan mempengaruhi kondisi ekonomi saat ini.

Kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari juga berbeda-beda. Ada keluarga dengan dua anggota yang bekerja dan total penghasilan mencapai Rp 7.000.000, serta ada yang hanya memiliki satu pencari nafkah dengan penghasilan tidak tetap. Berdasarkan perhitungan pendapatan per kapita dan perbandingan dengan garis kemiskinan Kabupaten Sidoarjo (Rp 523.213 per kapita per bulan), sebagian besar subjek sebenarnya tidak tergolong miskin. Dengan demikian tidak semua penerima bantuan tergolong keluarga miskin secara objektif. Banyak dari mereka yang seharusnya tidak layak menerima bantuan jika mengacu pada data ekonomi dan kriteria kemiskinan yang ditetapkan pemerintah.

4.2 Because of Motive Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan

Because of motivate sebagaimana merupakan teori motif fenomenologi yang mana buah pemikiran dari Schutz menyatakan bahwasannya adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu dan hal tersebut tidak muncul begitu saja melainkan melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi serta mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta norma etika agama atas dasar tingkat pemahaman sendiri sebelum tindakan yang berkaitan itu dilakukan. Mengacu pada temuan pada penelitian diatas, diketahui bahwa alasan

terbesar masyarakat dalam menerima bantuan BPNT adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar, yakni pangan. BPNT memberikan sembako yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia untuk mampu bertahan hidup yakni makan. Tetapi dalam hal ini ditemukan bahwasannya program ini masih belum tepat sasaran, dimana banyak keluarga keluarga yang masuk dalam kategori keluarga tidak miskin tetapi tetap memperoleh bantuan.

Dapat dikatakan bahwasannya motivasi yang mendasari masyarakat merasa mereka layak mendapatkan bantuan ini adalah bantuan ini dianggap sebagai rezeki yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat tidak memahami esensi yang sebenarnya terkait mengapa sudah semestinya masyarakat mendapatkan bantuan ini. Masyarakat kebanyakan tidak menyadari apakah dirinya layak atautkah tidak dalam diberikannya bantuan, dan memiliki persepsi bahwasannya rezeki sudah semestinya tidak ditolak.

Budaya ini sangat erat kaitannya dengan agama, yang mana agama Islam—agama mayoritas di desa ini—selalu mengajarkan bahwasannya sudah semestinya kita menghargai pemberian Tuhan. Pemberian bantuan BPNT ini dikategorisasikan sebagai bentuk rezeki yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana dalam hal ini bisa dilihat dari beberapa narasumber yang mengatakan bahwa dapat tidaknya bantuan BPNT ini adalah tergantung takdir dan rezeki dari Allah. Bukan hanya itu saja yang melatarbelakangi masyarakat seakan menerima secara suka rela dan merasa tidak ada yang salah atas tindakannya dalam menerima bantuan BPNT ini. Hal ini juga dilatarbelakangi atas pola pikir yang sudah melekat di benak masyarakat sejak lama. Pola pikir memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya hingga perilaku korupsi. Perilaku korupsi sejatinya bukan hanya patologi birokrasi saja karena faktanya masyarakat kita sering kali melakukan normalisasi terhadap tindak korupsi.

Pola pikir masyarakat ini merupakan pola pikir yang sudah ada sejak lama, dimana memiliki kecenderungan untuk menguntungkan dirinya sendiri sekalipun hal tersebut merugikan orang lain. Kurangnya budaya malu menerima hal yang bukan haknya dan juga memiliki kecenderungan oportunistik menjadi alasan mengapa meskipun tidak masuk dalam kategori keluarga miskin tetapi tetap mau menerima BPNT tersebut. Rasa malu merupakan kontrol sosial yang efektif untuk mencegah seseorang berbuat curang. Sebagaimana dijelaskan oleh Hirschi bahwasannya kontrol sosial dilakukan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki moral yang bisa dikontrol tidak hanya dari diri individu itu sendiri tapi juga dari sosial dan lingkungan sekitarnya, hal tersebut juga termasuk lingkungan pertemanan, kerja, hingga lingkungan keluarga ikut berperan aktif dalam terbentuknya kontrol sosial. Terkait fenomena penerima BPNT yang tidak tepat sasaran tersebut, dikarenakan terdegradasinya budaya malu yang ada di sekitar masyarakat yang kaitannya dalam pemberian bantuan sosial ini (Khodijah,

2018). Temuan data penelitian yang menonjol yakni lebih kepada budaya masyarakat yang menganggap bahwasannya bantuan pemerintah ini merupakan bagian dari rezeki yang tidak seharusnya ditolak. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan keadaan di sekitarnya nampaknya tidak menyadari secara pasti terkait kesenjangan ekonomi yang ada di sekitarnya sehingga menganggap dirinya layak menerima meskipun tidak merasa kesulitan ekonomi.

4.3. In Order To Motive Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan

In order to motivate sejatinya dalam hal ini berkaitan dengan motif tujuan, dimana hal ini berkaitan dengan tujuan kedepannya yang hendak dicapai oleh individu dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, tindakan yang dilaksanakan bersifat subjektif dan memiliki tujuan serta keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari intersubjektivitas.

Pada penelitian ini, ditemukan suatu temuan di penelitian bahwasannya yang menjadikan kondisi tidak tepat sasaran ini dikarenakan terdapat suatu tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Harapannya dengan demikian, uang yang diberikan bisa menutupi kebutuhan yang dimilikinya. Hal ini utamanya terjadi kepada penerima yang benar-benar tidak mampu. Bagi penerima yang tidak memiliki pekerjaan, maka adanya BPNT ini diharapkan mampu meringankan beban anaknya yang selama ini menanggung ekonomi dirinya. Bantuan BPNT yang berupa sembako sangat membantu dalam mengurangi beban ekonomi yang selama ini dialaminya,

Selain itu, penerima BPNT kebanyakan merasa layak mendapatkan bantuan ini sekalipun dirinya sendiri menyadari bahwa merupakan kategori keluarga yang mampu. Hal ini disebabkan karena dirinya merasa membayar pajak sebagaimana orang yang lainnya, sehingga mendapatkan bantuan ini sama seperti sebagaimana pemerintah memberikan subsidi bagi mereka yang kurang berhak. Dapat dikatakan motif tujuan yang menonjol adalah motif ekonomi, dimana manusia memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan kekayaan atau sumber uang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, sekalipun bukan kategori yang layak menerima, masyarakat tetap menerima bantuan dan enggan melaporkan ketidaktepat sasaran tersebut.

5. Kesimpulan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lajuk banyak diterima oleh keluarga menengah ke atas, sehingga tidak tepat sasaran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, kepemilikan aset, dan kondisi rumah. Motif masyarakat

menerima bantuan BPNT mengacu pada because of motive dikarenakan masyarakat memiliki budaya yang berkaitan erat dengan agama dimana bantuan ini dianggap sebagai bagian dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak sepatutnya ditolak meskipun sebenarnya tidak sesuai atau orang yang bersangkutan sejatinya tidak layak menerima. Selain itu juga dikarenakan semakin terdegradasinya budaya malu, yang mana sebenarnya budaya malu adalah alat kontrol sosial yang efektif untuk hal ini. Masyarakat Indonesia juga sering kali menormalisasi kecurangan atau korupsi kecil sehingga dengan demikian tindakan pemberian BPNT yang tidak tepat sasaran ini sebenarnya bagian dari korupsi kecil tetapi masyarakat tidak menyadarinya.

Motif masyarakat menerima bantuan BPNT sebagai bentuk in order to motivate ini dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Bagi masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan, keberadaan bantuan ini mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan mengurangi beban penanggungnya dalam bidang ekonomi. Sementara itu, bagi masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan, mereka masih merasa berhak menerima karena sudah membayar pajak dan semestinya rezeki tidak ditolak.

Daftar Pustaka

- [1] Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 1–7
- [2] Aspar, Sakaruddin, M., & Syakhrudin, D. N. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Washiyah*, 1(2), 305–325
- [3] Badan Pusat Statistik. (2022a). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/23/183/5/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>.
- [4] Badan Pusat Statistik. (2022b). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- [5] Febrinastri, F., & Firmansyah, I. (2022). *BPNT akan Dicairkan secara Tunai, Mensos Tegaskan Proses Penyalurannya Terus Dimatangkan*. Suara.com

- [6] Gustin. (2019). *Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan Gustin*. 10(2), 376–397.
- [7] Harianto, S. (2015a). Relasi Orang Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. *Seminar Nasional Riset Inovatif, February*, 375–379.
- [8] Harianto, S. (2015b). *Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Miskin*
- [9] Harianto, S. (2018). Needs-Based Poverty Reduction in Rural Areas. *Advanced Science Letters*, 23(12), 11748–11752. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10509>
- [10] Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(1), 38–43. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i1.77>.
- [11] Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. July.
- [13] Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama
- [14] Trino Ikhsan, Zulfan, & Nusuary, F. M. (2019). Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Gampong Kutatinggi, Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 4(2)*.